

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Temanggung hingga tahun perencanaan 2044 menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan pelayanan pendidikan, khususnya pada jenjang SMP. Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk Kabupaten Temanggung diperkirakan mencapai 1.012.328 jiwa pada tahun 2044, sedangkan penduduk usia sekolah 13–15 tahun diperkirakan mencapai 66.084 jiwa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perencanaan sarana pendidikan SMP perlu dilakukan secara terarah agar mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk usia sekolah. Perhitungan kebutuhan sarana pendidikan dilakukan dengan mengacu pada standar kapasitas rombongan belajar, yaitu maksimal 32 peserta didik per rombongan belajar sebagaimana diatur dalam ketentuan pendidikan nasional, serta mempertimbangkan standar sarana pendidikan berdasarkan SNI 03-1733-2004 dan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007.

Perencanaan lokasi sarana pendidikan SMP di Kabupaten Temanggung dilakukan melalui pendekatan spasial dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kelayakan lokasi. Analisis jangkauan pelayanan SMP eksisting dilakukan untuk mengetahui wilayah yang sudah terlayani dan belum terlayani oleh sarana pendidikan yang ada. Selain itu, penentuan lokasi juga mempertimbangkan variabel aksesibilitas jaringan jalan, tingkat kerawanan bencana, penggunaan lahan, fungsi kawasan, kebisingan kawasan industri, kawasan sempadan badan air, serta kawasan pertanian. Seluruh variabel tersebut dianalisis melalui metode skoring, klasifikasi, dan *overlay* untuk menghasilkan lahan yang direkomendasikan sebagai rencana lokasi pembangunan sarana pendidikan SMP baru.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat sejumlah lahan yang direkomendasikan sebagai rencana lokasi sarana pendidikan SMP baru di Kabupaten Temanggung. Lahan rekomendasi tersebut tersebar pada beberapa kecamatan, yaitu Bejen, Bulu, Candiroto, Gemawang, Jumo, Kaloran, Kandangan, Kedu, Kranggan, Pringsurat, dan Wonobojo. Sebaran lahan rekomendasi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Temanggung masih memiliki potensi ruang untuk pengembangan sarana pendidikan pada wilayah yang membutuhkan peningkatan pelayanan. Penentuan lokasi tersebut juga telah mempertimbangkan kesesuaian dengan arahan pemanfaatan ruang dalam RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024–2044, perlindungan kawasan sempadan badan air berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015,

pengendalian kebisingan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996, serta penghindaran terhadap lahan sawah dilindungi agar pembangunan sarana pendidikan tetap selaras dengan prinsip keamanan, keberlanjutan, dan pemerataan pelayanan pendidikan.

5.2 Rekomendasi

Pemerintah daerah Kabupaten Temanggung disarankan untuk menjadikan hasil analisis spasial ini sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam perencanaan pembangunan sarana pendidikan SMP baru. Pembangunan sarana pendidikan sebaiknya diarahkan pada wilayah yang memiliki kebutuhan pelayanan pendidikan tinggi, berada di luar jangkauan optimal SMP eksisting, serta memiliki aksesibilitas yang baik terhadap jaringan jalan. Lokasi yang dipilih juga perlu memperhatikan kesesuaian tata ruang, keamanan dari risiko bencana, ketersediaan lahan, jarak aman dari sempadan badan air, serta tidak berada pada lahan sawah yang dilindungi. Dengan demikian, pembangunan sarana pendidikan SMP dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, standar pelayanan pendidikan, serta ketentuan pemanfaatan ruang yang berlaku.

Sebagai upaya jangka panjang, hasil rencana lokasi lahan sarana pendidikan SMP/ sederajat perlu ditindaklanjuti dengan kajian teknis yang lebih rinci, terutama terkait status hak tanah, kondisi fisik lahan, kesiapan infrastruktur, dan dukungan pembiayaan. Validasi status hak tanah melalui sistem pertanahan resmi perlu dilakukan untuk memastikan bahwa lokasi yang direkomendasikan memiliki kepastian hukum dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan fasilitas pendidikan. Selain itu, evaluasi kebutuhan sarana pendidikan perlu dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk, perubahan penggunaan lahan, perkembangan jaringan jalan, dan dinamika kebutuhan pendidikan di setiap kecamatan. Langkah ini diharapkan dapat mendukung pemerataan akses pendidikan, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, serta mewujudkan perencanaan sarana pendidikan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan wilayah Kabupaten Temanggung.